



Segera Tuntaskan Sengkarut Aset



LHP: Sidang paripurna terkait penyerahan LHP 2024 dan IHPD 2024 oleh BPK kepada DPRD dan Pemprov Kalbar, Senin(2/6).

ISTIMEWA

PONTIANAK – Pemprov Kalbar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD tahun 2024. Ini menjadi pencapaian keenam sejak 2020. Meski membawa

kabar gembira, capaian ini diiringi dengan sejumlah temuan yang harus segera diperbaiki, terutama dalam pengelolaan aset tetap.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyatakan apresiasinya ke-

pada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berupaya mempertahankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

◆ Ke Halaman 11 kolom 5

Segera Tuntaskan Sengkarut Aset

Sambungan dari halaman 9

“Kami (Pemprov Kalbar) sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah membantu Pemprov Kalbar meraih kembali predikat WTP. Ini adalah hasil dari komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik,” ujar Ria Norsan, Senin(2/6).

Norsan menegaskan rekomendasi dari BPK, terutama terkait aset tetap yang hilang dan kelebihan pembayaran proyek konstruksi senilai Rp1,4 miliar, harus segera ditindaklanjuti.

“Terkait temuan aset yang hilang dan beberapa kekurangan volume proyek, kami akan segera bekerja cepat. Ada batas waktu yang diberikan oleh BPK, dan kami akan pastikan itu diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan agar tidak membebani laporan keuangan periode berikutnya,” tambahnya.

Norsan menegaskan, penyelesaian rekomendasi BPK bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral kepada masyarakat Kalbar. “Setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap dana digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Ketua DPRD Kalbar, Aloysius menyambut baik hasil WTP yang diraih Pemprov Kalbar. Ia menyebut bahwa apresiasi patut diberikan atas upaya pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan.

“Kami memberikan apresiasi atas usaha maksimal pemerintah provinsi hingga bisa meraih WTP untuk keenam kalinya. Ini menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap transparansi,” katanya.

Aloysius juga menyoroti pentingnya penuntasan re-

komendasi BPK, terutama terkait pengelolaan aset tetap. Menurutnya, DPRD akan aktif mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut.

“Ada batas waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kami akan terus memantau agar semua rekomendasi benar-benar dilaksanakan, termasuk dalam masalah aset yang hilang,” ujarnya. Aloysius menekankan perlunya sistem internal yang lebih ketat agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa depan. “Penting juga untuk meningkatkan kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), sehingga bisa mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mencegah kesalahan yang sama terulang,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong efektivitas pengelolaan anggaran. **(den)**